



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TB. HAERU RAHAYU
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 102398

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.788.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m²/36 m² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/200 m² di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah Seluas 556 m² di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 115.000.000
4. Tanah Seluas 72 m² di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/115 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.415.000.000
6. Tanah Seluas 2685 m² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 73.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 206.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI KENDARAAN RODA EMPAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 81.400.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 189.542.510

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.509.400.145

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.774.342.655



III. HUTANG

Rp. 1.147.656.479

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.626.686.176

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.